

## Hibah Bansos Dicairkan Lewat Induk Organisasi

**MUNGKID**-Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Umar Wijaya menyatakan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah bisa dicairkan dengan berbagai cara. Selain memberikan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada calon penerima anggaran juga bisa dilewatkan melalui induk organisasi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ▶ Baca *Hibah...* hal 9

## Minta Dialokasikan ke Belanja SKPD

### ■ HIBAH

*Sambungan Radar Kedu hal. 5*

"Pemerintah daerah tidak perlu khawatir soal pencairan hibah bansos kan sudah ada SE Mendagri (SE nomor 900/4627/SJ)," katanya dalam diskusi bersama DPRD Kabupaten Magelang, kemarin.

Menurutnya, hibah atau bansos bisa dimasukkan ke induk organisasi yang sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seperti NU, Muhammadiyah, KONI maupun organisasi lainnya. "Untuk pengajian dan kegiatan kemasyarakatan kan juga bisa," kata dia.

Bahkan, lanjutnya, Bupati bisa mensertifikasi kelompok penerima dengan surat keterangan terdaftar (SKT). "Banyak pemerintah daerah yang sudah

melakukannya, dan berani mencairkan hibah bansos," katanya.

Tidak hanya itu, anggaran dari hibah bansos bisa dialokasikan untuk program kerja lainnya. "Supaya Silpanya tidak terlalu tinggi," jelas staf ahli dari Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri ini.

Namun demikian, lanjut Umar, pihaknya juga akan berencana melakukan revisi Permendagri 39 tahun 2013. "Karena banyak desakan dari pemerintah daerah akan kami lakukan revisi," jelas dia.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Magelang M Sobikin mengatakan, sebelumnya pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persoalan ini. Di mana, BPK justru

tidak merestui pencairan dana hibah bansos yang tidak sesuai Permendagri tersebut.

"BPK sudah menolak. Maka kami harap ada solusi supaya antara lembaga pemerintah ini bersinergi," kata dia. Lebih lanjut, kata dia, dalam PP 38 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sekretaris Fraksi PDIP Kabupaten Magelang M Yusuf Sakir mengatakan besaran dana hibah bansos bisa dialokasikan melalui belanja modal di tiap SKPD. "Bisa juga dialihkan ke belanja modal," kata dia.

Dia mencontohkan bansos untuk beberapa kelompok tani bisa dialihkan ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. "Di sana, nanti kebutuhan kelompok itu bisa diakomodir dan dimasukkan ke belanja modal," ungkap dia. **(vie/ton)**